



**RENCANA KERJA  
(RENJA) REVISI  
INSPEKTORAT KABUPATEN BERAU  
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
INSPEKTORAT  
2018**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Inspektorat Kabupaten Berau mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tahunan pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Penyusunan rencana kerja SKPD tetap harus berkesinambungan dengan Renstra dalam penyusunan rencana kerja baik dalam program maupun kegiatan-kegiatan yang ada dalam program tersebut Renstra harus menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja.



Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1 sebagai berikut.

Gambar 1.1





Berdasarkan visi kabupaten tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Berau menetapkan visinya sebagai berikut :

**“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik ( clean and good governance ) melalui pengawasan yang optimal”**

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Kabupaten Berau dipandang perlu menetapkan 4 (empat) misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Berau yaitu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kampung;  
Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam menyelenggarakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kampung. Pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel setiap layanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Pengambilan Kebijakan;  
Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat dapat memberikan jaminan kualitas pengawasan dalam pengambilan kebijakan, dan meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan perubahan dimasa yang akan datang.
3. Mendorong Terwujudnya Aparatur yang Bersih dan Handal;  
Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat dapat meningkatkan pelayanan pengawasannya sehingga program / kegiatan pemerintah dan kampung yang dilaksanakan serta diawasi oleh aparatur yang bersih dan handal.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan.  
Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat dapat memberikan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa,



transparan, dan akuntabel di pandang perlu meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan, dalam mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pengawasan.

Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Inspektorat Kabupaten Berau menyusun Rencana Kerja Tahun 2020. Selanjutnya, Renja yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Berau mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2019 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2019. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kinerja ini adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Berau dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat;
5. Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit kerja Pemerintah Kabupaten Berau dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Berau
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V PENUTUP**



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2019 & Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja ( renja ) Inspektorat Tahun 2019. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan, pada tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Berau melaksanakan 7 (Tujuh) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan pokok, terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, program ini bertujuan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Berau

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Penyediaan Jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



9. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
  10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  11. Penyediaan peralatan rumah tangga
  12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  13. Penyediaan makanan dan minuman
  14. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  15. Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
  16. Penyediaan jasa Tenaga administrasi / teknis perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Kegiatan yang dilaksanakan :
1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
  3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  4. Pengadaan teknologi informasi pengawasan
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
1. Pengadaan baju batik
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
1. Pendidikan dan pelatihan formal
  2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Kegiatan yang dilaksanakan :
1. Sosialisasi kinerja program SKPD
  2. Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- Kegiatan yang dilaksanakan :
1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
  2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
  3. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
  4. Inventarisasi temuan pengawasan



5. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
  6. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
  7. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
  8. Pembinaan, identifikasi dan penilaian risiko
  9. Pemberian/pelayanan jasa advice pengawasan
7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
2. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas
3. Pengembangan wawasan aparat pengawasan internal pemerintah daerah
4. Sosialisasi dan Peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

Dalam rangka pencapaian Visi dan misi Inspektorat Kabupaten Berau menetapkan tujuan Strategis untuk periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik pada jajaran pemerintah Kabupaten Berau merupakan tujuan, dari misi inspektorat menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung, serta Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pengambilan kebijakan, dengan sasaran Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

2. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik pada jajaran pemerintah Kabupaten Berau merupakan tujuan, dari misi inspektorat dalam Mendorong terwujudnya aparatur yang bersih dan handal serta Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan dengan sasaran Menurunnya temuan audit kinerja SKPD dibawah target.

Dengan total anggaran Inspektorat pada tahun 2019 untuk Belanja Langsung Rp.8.131.325.000,- maka disusun rencana kerja tahunan seperti tabel dibawah ini :



Tabel 2.1

**RENCANA KERJA TAHUNAN  
TAHUN 2019**

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					KET		
URAIAN	INDIKATOR	Rencana Tingkat capaian (Target)			URAIAN	INDIKATOR	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)				
		Satuan	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	Jumlah temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	temuan	10	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	01	Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala	Input	Tersedianya dana	Rp.	2.230.000.000,-	
								Out Put	Jumlah Pengawasan internal secara berkala (Obrik yang diperiksa)	Obrik	60	
								Out Come	Pemeriksaan reguler, Reviw Keuangan dan Evaluasi LAKIP	%	100	
						02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Input	Tersedianya dana	Rp.	845.000.000,-	
								Out Put	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	kasus / laporan	40	
								Out Come	Persentase Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah kasus yang diperiksa	%	100	
					04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Input	Tersedianya dana	Rp.	1.195.000.000,-		
							Out Put	Jumlah kampung ditangani penanganan kasus	kampung	100		



						Out Come	Pemeriksaan kasus diwilayah Kecamatan / Kampung	%	86	
				05	Inventarisasi temuan pengawasan	Input	Tersedianya dana	Rp.	192.000.000,-	
						Out Put	Jumlah bulan Laporan Inventarisasi temuan pengawasan	bulan	4	
						Out Come	Tersedianya rekap Data Hasil Temuan Pemeriksaan Reguler dan Khusus serta Data LP2P	%	100	
				06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Input	Tersedianya dana	Rp.	274.000.000,-	
						Out Put	Jumlah bulan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	bulan	13	
						Out Come	Hasil Temuan Pengawasan yang ditindak lanjuti	%	100	
				07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Input	Tersedianya dana	Rp.	480.000.000,-	
						Out Put	Jumlah Koordinasi pengawasan dan saber pungli	kali	24	
						Out Come	Terawasinya Kasus kasus penyimpanan termasuk Pungutan liar	%	100	
				08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Input	Tersedianya dana	Rp.	65.000.000,-	
						Out Put	Jumlah temuan yang dievaluasi	temuan	1	
						Out Come	Terevaluasinya temuan hasil pengawasan	%	100	









							diakan			
							Out Come	Ter-penuhinya Alat Tulis Kantor	%	100
							Input	Tersedianya dana	Rp.	15.000.000,-
							Out Put	Jumlah Dokumen yang dicetak	Buah	70
							Out Come	Ter-penuhinya barang ce-takan dan penggan-daan	%	100
							Input	Tersedianya dana	Rp.	3.000.000,-
							Out Put	Jenis Peralatan Listrik yang disediakan	Jeni s	5
							Out Come	Ter-penuhinya komponen listrik, pen-erangan bangunan kantor	%	100
							Input	Tersedianya dana	Rp.	451.361.000,-
							Out Put	Jenis Peralatan Listrik yang disediakan	Unit	5
							Out Come	Ter-penuhinya komponen listrik, pen-erangan bangunan kantor	%	100
							Input	Tersedianya dana	Rp.	6.500.000,-
							Out Put	Jenis Peralatan Listrik yang disediakan	Bua h	9
							Out Come	Ter-penuhinya komponen listrik, pen-erangan bangunan kantor	%	100
							Input	Tersedianya dana	Rp.	3.000.000







						Input	Tersedianya dana	Rp.	36.000.000,-		
				03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	6	Pengadaan Pakaian Batik	Out Put	Jumlah pakaian batik dan perlengkapannya	Stell	60
						Out Come	Terpenuhinya Kebutuhan akan pakaian batik dan perlengkapannya	%	100		
						Input	Tersedianya dana	-	-		
						Out Put	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-		
						Out Come	Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti Pelatihan Formal	-	-		
				21	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
						1	Pendidikan dan Pelatihan Formal				
						2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				
						Input	Tersedianya dana	-	-		
						Out Put	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-		
						Out Come	Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-		
				06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	Sosialisasi Program SKPD	Input	Tersedianya dana	Rp.	20.000.000,-
						Out Put	Jumlah sosialisasi kinerja program SKPD melalui pameran yang diikuti	Kali	1		



						Out Come	Persentase sosialisasi kinerja program SKPD melalui pameran yang diikuti	%	100	
					9	Input	Tersedianya dana	Rp.	17.500.000,-	
						Out Put	Jumlah Dokumen perencanaan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	5	
						Out Come	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	%	85.5	
<b>JUMLAH</b>								Rp.	<b>9.720.000.000,-</b>	

Untuk mencapai Sasaran di atas telah dialokasikan anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. 17.851.325.000 yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja tidak langsung) . Belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.131.325.000 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.720.000.000

Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 sebagaimana dalam Tabel 2.2 dan Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019 tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel. 2.2**  
**Realisasi Belanja tidak langsung - TA 2019**  
**Inspektorat Kabupaten Berau s/d Desember 2019**

TAHUN	Belanja Langsung	Anggaran	Realisasi		Sisa	
		(Rp.)	(Rp.)	% Fisik Keg	% Keuangan	(Rp.)
1	2	3	4		5	6
2018	Belanja Pegawai	6.528.700.000,-	5.968.761.677,-	100 %	91,42	559.938.323,-
2019	Belanja Pegawai	8.131.325.000,-	7.028.548.633,-	100 %	86,44	1.102.776.367,-

*Sumber Data Subbag Keuangan dan Aset*



**Tabel. 2.3**  
**Realisasi Belanja Langsung - TA 2019**  
**Inspektorat Kabupaten Berau**  
**KONDISI S/D BULAN DESEMBER 2019**

No	Sasaran Strategis		Belanja Langsung	Alokasi		Realisasi Fisik Keg		Realisasi Keuangan		Silpa
				Target/ Volume	Anggaran (Rp)	Target/ Volume	% Keg	(RP)	% Keu	(RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	20	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	256	5,366,000,000	237	93,24	4,795,630,513	89,37	570,369,487
		01	Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala	60	2,230,000,000	60	100.00	2,161,169,847	96.91	68,830,153
		02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	40	845,000,000	29	72.50	776,416,400	91.88	68,583,600
		04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	100	1,195,000,000	100	100.00	1,033,695,000	86.50	161,305,000
		05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	4	192,000,000	4	100.00	186,678,593	97.23	5,321,407
		06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	12	274,000,000	12	100.00	201,188,009	73.43	72,811,991
		07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	24	480,000,000	16	66.67	311,548,756	64.91	168,451,244
		08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	2	65,000,000	2	100.00	57,328,908	88.20	7,671,092
		09	Pembinaan, Identifikasi dan penilaian resiko perangkat daerah	12	50,000,000	12	100.00	32,900,000	65.80	17,100,000
		10	Pemberian/Pelayanan Jasa Advice Pengawasan	2	35,000,000	2	100.00	34,705,000	99.16	295,000
2	Menurunnya temuan audit kinerja OPD di bawah target	01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2,922	2,117,038,000	2902	97	1,847,041,898	91,97	170,011,651
		01	Penyediaan jasa surat menyurat	583	5,580,000	583	100.00	5,023,500	90.03	556,500
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	198,600,000	12	100.00	146,665,299	75.85	51,934,701
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	31	360,000,000	31	100.00	332,020,324	92.23	27,979,676
		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	23	129,808,000	23	100.00	114,682,000	88.35	15,126,000



08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,438	5,330,000	1438	100.00	5,330,000	100.00	-
09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5	25,000,000	5	100.00	24,724,000	98.90	276,000
10	Penyediaan alat tulis kantor	20	83,000,000	20	100.00	83,000,000	100.00	-
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	70	15,000,000	52	74.29	14,991,500	99.94	8,500
12	Penyediaan komponen instalasi listrik / pererangan bangunan kantor	5	3,000,000	5	100.00	3,000,000	100.00	-
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5	451,361,000	5	100.00	416,493,470	92.29	34,867,530
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	9	6,500,000	8	88.89	5,467,000	84.11	1,033,000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	600	3,000,000	600	100.00	3,000,000	100.00	-
17	Penyediaan makanan dan minuman	37	69,459,000	37	100.00	69,458,400	100.00	600
18	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	28	400,000,000	28	100.00	399,184,576	99.80	815,424
19	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	47	70,000,000	47	100.00	70,000,000	100.00	-
20	Penyediaan jasa Tenaga administrasi / teknis perkantoran	9	291,400,000	8	88.89	253,986,280	87.16	37,413,720
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>7</b>	<b>474,942,000</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>462,528,000</b>	<b>97,38</b>	<b>12,459,000</b>
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	451,942,000	1	100.00	439,942,000	97.34	12,000,000
22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1	15,000,000	1	100.00	14,694,500	97.96	350,500
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5	8,000,000	5	100.00	7,891,500	98.64	108,500
45	Pengadaan Teknologi Informasi Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>60</b>	<b>36,000,000</b>	<b>59</b>	<b>98,33</b>	<b>35,400,000</b>	<b>98.33</b>	<b>600,000</b>
06	Pengadaan Pakaian batik beserta perlengkapannya	60	36,000,000	59	98.33	35,400,000	98.33	600,000
<b>05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



01	Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	-	-	-	-	-
02	Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan	-	-	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>6</b>	<b>37,500,000</b>	<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>35,044,821</b>	<b>93,45</b>	<b>2,455,179</b>
05	Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	5	17,500,000	5	100.00	15,044,821	85.97	2,455,179
09	Sosialisasi kinerja program SKPD	1	20,000,000	1	100.00	20,000,000	100.00	-
<b>21</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>74</b>	<b>1,688,520,000</b>	<b>90</b>	<b>107,74</b>	<b>1,153,104,257</b>	<b>92,68</b>	<b>123,538,631</b>
01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	21	1,047,900,000	40	190.48	1,043,186,172	99.55	4,713,828
03	Pelatihan teknis pengawasan	21	162,780,000	19	90.48	109,918,085	67.53	52,861,915
04	Pengembangan wawasan aparat pengawas internal pemerintah daerah	30	277,840,000	30	100.00	273,858,902	98.57	3,981,098
05	Sosialisasi, peningkatan maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	2	200,000,000	1	50.00	138,081,210	69.01	61,981,790
<b>TOTAL</b>		<b>3,325</b>	<b>9,720,000,000</b>	<b>3,301</b>	<b>99,60</b>	<b>8,328,749,489</b>	<b>90,95</b>	<b>879,433,948</b>



**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)\***  
**Inspektorat Kabupaten Berau**

No.	Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2019	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran)	TA. 2019			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun)	Perkiraan Realisasi	
						Target Renja SKPD (DPAP)	Realisasi Renja SKPD (Realisasi DPAP)	Tingkat realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7/8%	10	11	12 = 10/4%
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
Inspektorat											
01	4 02 01 01	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100.00%	95.17%	100.00%	83.24%	83.24%	100.00%	83.24%	83.24
1	4 02 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang bermaterai /	583 lem bar	583 lem bar	583 lem bar	583 lem bar	100.00	583 lem bar	583 lem bar	100.00
2	4 02 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Kendaraan Dinas yang diservice, ganti suku cadang, KIR dan mendapat BBM	12 bul an	12 bul an	12 bul an	12 bul an	100.00	12 bul an	12 bul an	100.00
3	4 02 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional yang	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit	100.00	31 unit	31 unit	100.00
4	4 02 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan tim penilai angka kredit fungsional	23 orar	23 orang	23 orar	23 orang	100.00	23 orang	23 orang	100.00
5	4 02 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah gedung dan halaman yang dibersihkan	1438 m <sup>2</sup>	1438 m <sup>2</sup>	1438 m <sup>2</sup>	1438 m <sup>2</sup>	100.00	1438 m <sup>2</sup>	1438 m <sup>2</sup>	100.00
6	4 02 01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100.00	5 unit	5 unit	100.00
7	4 02 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yang disediakan	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100.00	20 jenis	20 jenis	100.00
8	4 02 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak	70 bu ah	70 bu ah	70 bu ah	70 bu ah	100.00	70 bu ah	70 bu ah	100.00
9	4 02 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis peralatan listrik yang disediakan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100.00	5 jenis	5 jenis	100.00
10	4 02 01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kerja dan perlengkapan kantor	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100.00	5 jenis	5 jenis	100.00
11	4 02 01 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	9 bu ah	9 bu ah	9 bu ah	9 bu ah	100.00	9 bu ah	9 bu ah	100.00
12	4 02 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Jumlah bacaan yang disediakan	600 eks em plar	600 eks em plar	600 eks em plar	600 eks em plar	100.00	600 eks em plar	600 eks em plar	100.00
13	4 02 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan minuman dan rapat tamu	37 kali	37 kali	37 kali	37 kali	100.00	37 kali	37 kali	100.00
14	4 02 01 01 18	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	28 ot	28 ot	28 ot	28 ot	100.00	28 ot	28 ot	100.00
15	4 02 01 01 19	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	47 ok	47 ok	47 ok	47 ok	100.00	47 ok	47 ok	100.00
16	4 02 01 01 20	Penyediaan jasa Tenaga administrasi / teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi / teknis perkantoran	9 ora ng	9 ora ng	9 orar	9 ora ng	100.00	9 ora ng	9 ora ng	100.00



02	4	02	01	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal	80.00%	66.67%	80.00%	55.11%	68.89%	80.00%	55.11%	68.89	
1	4	02	01	02	10	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair yang dibayarkan	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	02	01	02	21	Pengadaan Gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang dibayarkan	-	-	-	-	-	-	-	
3	4	02	01	02	05	Pengadaan Mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang dibayarkan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100.00	1 unit	1 unit	100.00
4	4	02	01			Pengadaan Kendaraan dinas / operasional roda 2	Jumlah Kendaraan dinas / operasional roda 2 yang dibayarkan	-	-	-	-	-	-	-	
5	4	02	01			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dibayarkan	-	-	-	-	-	-	-	
6	4	02	01			Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dibayarkan	-	-	-	-	-	-	-	
7	4	02	01	02	45	Pengadaan Teknologi Informasi pengawasan	Jumlah Teknologi Informasi pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	
8	4	02	01	02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100.00	1 kali	1 kali	100.00
9	4	02	01	##	##	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	-	-	-	-	-	-	-	
10	4	02	01	##	##	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional roda 2	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional roda 2 yang dibayarkan	-	-	-	-	-	-	-	
11	4	02	01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100.00	5 jenis	5 jenis	100.00
12	4	02	01	##	##	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang dibayarkan	-	-	-	-	-	-	-	
13	4	02	01	02	31	Penyediaan Sewa gedung kantor	Jumlah Sewa gedung kantor yang dibayarkan	-	-	-	-	-	-	-	
14	4	02	01	02	42	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor yang dibayarkan	-	-	-	-	-	-	-	
15	4	02	01	02	43	Rehabilitasi sedang/ berat mobil jabatan	Jumlah Rehabilitasi sedang/ berat mobil jabatan yang dibayarkan	-	-	-	-	-	-	-	
16	4	02	01	02	44	Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas operasional	Jumlah Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas operasional yang dibayarkan	-	-	-	-	-	-	-	
03	4	02	01	03		Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase rata-rata tingkat kehadiran dan kedisiplinan berpakaian dinas	-	-	-	-	-	-	-	
1	4	02	01	03	02	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibayarkan	60 Stel	60 Stel	60 Stel	60 Stel	100.00	60 Stel	60 Stel	100.00



04	4	02	01	05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	4	02	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal yang mengikuti	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	02	01	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah yang mengikuti pelatihan BIMTEK	-	-	-	-	-	-	-	-
05	4	02	01	06	##	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKjIP	85.50%	85.50%	85.50%	85.50%	100.00%	85.50%	85.50%	100.00
1	4	02	01	06	09	Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dok um en	5 dok um en	5 dok um en	5 dok um en	100.00	5 dok um en	5 dok um en	100.00
2	4	02	01	06	05	Sosialisasi kinerja program SKPD	Jumlah Sosialisasi kinerja program SKPD yang dibayarkan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100.00	1 kali	1 kali	100.00
06	4	02	01	20		Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Pemeriksaan dengan temuan yang ditindak lanjuti	86.00%	96.51%	86.00%	86.00%	100.00%	86.00%	86.00%	100.00
1	4	02	01	20	01	Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala	Jumlah pengawasan internal secara berkala (obrik yang diperiksa)	60 obr ik	60 obr ik	60 obr ik	60 obr ik	100.00	60 obr ik	60 obr ik	100.00
2	4	02	01	20	02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	40 kas us	40 kas us	40 kas us	40 kas us	100.00	40 kas us	29 kas us	72.50
3	4	02	01	20	04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Jumlah kampung ditangani penanganan kasus	100 ka mp ung	100 ka mp ung	100 ka mp ung	100 ka mp ung	100.00	100 ka mp ung	100 ka mp ung	100.00
4	4	02	01	20	05	Inventarisasi temuan pengawasan	Jumlah laporan inventarisasi temuan pengawasan	4 lap ora n	4 lap ora n	4 lap ora n	4 lap ora n	100.00	4 lap ora n	4 lap ora n	100.00
5	4	02	01	20	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100.00	12 kali	12 kali	100.00
6	4	02	01	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif yang dilaporkan	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	100.00	24 kali	16 kali	66.67
7	4	02	01	20	08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan yang dilaporkan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100.00	1 kali	1 kali	100.00
8						Pembinaan,Identifikasi dan penilaian Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Laporan identifikasi dan penilaian risiko	12 OP D	12 OP D	12 OP D	12 OP D	100.00	12 OP D	12 OP D	100.00
9						Pemberian/Pelayanan Jasa Advice Pengawasan	Jumlah Pelayanan yang dilakukan	2 Keg iat an	2 Keg iat an	2 Keg iat an	2 Keg iat an	100.00	2 Keg iat an	2 Keg iat an	100.00



07	4	02	01	21	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase auditor yang bersertifikat	84.00%	70.00%	84.00%	70.00%	83.33%	84.00%	70.00%	83.33	
1	4	02	01	21	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah peserta pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang	100.00	21 orang	21 orang	100.00
2	4	02	01	21	03	Pelatihan teknis pengawasan	Jumlah Peserta Pelatihan teknis pengawasan yang mengikuti	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang	100.00	21 orang	21 orang	100.00
4	4	02	01	21	04	Pengembangan wawasan aparat pengawas internal pemerintah daerah	Jumlah Peserta Pengembangan wawasan aparat pengawas internal pemerintah daerah yang mengikuti	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100.00	30 orang	30 orang	100.00
4	4	02	01	#	05	Sosialisasi, peningkatan maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	Peningkatan Level	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00

Secara garis besar pencapaian sasaran dalam rangka pencapaian Tujuan Inspektorat Kabupaten Berau yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil bila diukur dengan menggunakan pembandingan antara target dan realisasi. Adapun Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan Misi Inspektorat Kabupaten Berau sebagaimana tersebut di atas:

#### 1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik pada jajaran pemerintah Kabupaten Berau merupakan tujuan, dari misi inspektorat menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung, serta Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pengambilan kebijakan, dengan sasaran Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi.



## 2. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik pada jajaran pemerintah Kabupaten Berau merupakan tujuan, dari misi inspektorat dalam Mendorong terwujudnya aparatur yang bersih dan handal serta Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan.

Sebagai upaya dengan sasaran Menurunnya temuan audit kinerja SKPD dibawah target.

Dalam mendukung pencapaian misi keempat RPJMD 2016 - 2021 yaitu Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel Dalam Rangka mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*), **serta untuk mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Berau tersebut ditetapkan sasaran yaitu :**

1. Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;
2. Menurunnya temuan audit kinerja OPD di bawah target.

Sasaran-sasaran di atas dapat dilaksanakan dengan didukung alokasi Anggaran yang telah dialokasikan pada Tahun 2019 adapun tingkat pencapaian sasaran kinerja 1 dan 2 dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**PENGUKURAN KINERJA MENURUT SASARAN**  
**TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Propinsi/ Kab/Kota : Kalimantan Timur/ Berau

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN BERAU

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja			Target 2019	Realisasi 2019	% pen- capain target 2019
1		2			3	4	5
1	Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	1	Jumlah Temuan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi	temuan	10	0	100
		% pencapaian sasaran Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;					<b>100</b>
	Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 untuk mendukung pencapaian sasaran 1				Rp. 5.366.000.000,-		
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 untuk mendukung pencapaian sasaran 1				RP.4.795.630.000,-			



2	<b>Menurunnya Temuan Audit Kinerja SKPD dibawah target</b>	1	Jumlah OPD dengan kinerja di bawah target.	opd	10	0	100	
	% pencapaian Menurunnya Temuan Audit Kinerja SKPD dibawah target						<b>100</b>	
	Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 untuk mendukung pencapaian sasaran 2						Rp. 4.354.000.000,-	
	Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 untuk mendukung pencapaian sasaran 2						Rp. 4.044.935.539,-	
<b>Jumlah % Pencapaian Sasaran Tahun 2019</b>							<b>100</b>	
<b>Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 untuk mendukung pencapaian sasaran 1- 2</b>							<b>9.720.000.000,-</b>	
<b>Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 untuk mendukung pencapaian sasaran 1- 2</b>							<b>8.840.566.052,-</b>	
<b>Jumlah % Pencapaian Anggaran Tahun 2019</b>							<b>90,95</b>	

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Inspektorat**  
**Kabupaten Berau Tahun 2016-2017**

No	sasaran kinerja	SPM	Indikator Kinerja	Target				Realisasi Ca-paian		Proyeksi		Cata-tan Ana-lisis
				Tahun	Tahun	Ta-hun	Ta-hun	Ta-hun	Ta-hun	Ta-hun	Ta-hun	
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
				(ta-hun n-2)	(ta-hun n-1)	(ta-hun n)	(ta-hun n+1)	(ta-hun n-2)	(ta-hun n-1)	(ta-hun n)	(ta-hun n+1)	
1	Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;		Jumlah Temuan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi	15 temuan	13 temuan	13 temuan	10 temuan	8 temuan	7 temuan	3 temuan	0 temuan	



2	Menurunnya Temuan Audit Kinerja SKPD dibawah target	Jumlah OPD dengan kinerja di bawah target.	15 opd	13 opd	13 opd	10 opd	5 opd	6 opd	2 opd	0 opd	
---	---	--	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja diperoleh dengan merealisasikan anggaran sebanyak 90,95% dari yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja diperoleh dengan penggunaan anggaran yang efisien. Untuk selanjutnya diharapkan pencapaian anggaran dapat 100%, sehingga akan dilakukan penganggaran yang lebih akurat.

Sedangkan untuk tahun anggaran berjalan (tahun 2020), Inspektorat Kabupaten Berau akan melaksanakan program dan kegiatan dengan nilai anggaran sebesar **Rp 15.042.157.000,-** terdiri dari belanja tidak langsung **Rp 7.877.025,-** dan belanja langsung **Rp. 7.165.132.000** Diperkirakan pada akhir tahun ini dicapai realisasi fisik 100 % dengan realisasi anggaran minimal 90%. Untuk mencapai realisasi di atas, Inspektorat Kabupaten Berau telah menyusun tahapan pencairan anggaran yang sejalan dengan kegiatan fisiknya, sehingga realisasi fisik dan anggaran yang diharapkan dapat tercapai.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Inspektorat adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan.

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Berau.



Berdasar Peraturan Bupati Berau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Berau, terdiri dari seorang Inspektur, seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Inspektur Pembantu Wilayah dengan rincian sebagai berikut :

1. Inspektur ;
2. Sekretariat, membawahi :
  - Sub Bagian Penyusunan Program
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional :
  - Auditor;
  - Pemeriksa

Berdasar Peraturan Bupati Berau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan



6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Inspektorat Kabupaten Berau didominasi oleh penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah. Capaian kinerja pelayanan untuk tahun 2019 diukur dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Berpedoman pada Permen No. 54 tahun 2010, dan dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan disesuaikan dengan format dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA perihal Penyusunan LPPD. Inspektorat melaksanakan urusan Pemerintahan umum terkait dengan efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD yang mempunyai dua aspek yang terkait secara langsung yaitu Kewajaran Laporan Keuangan dan Pengawasan Inspektorat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2017 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.5**  
Penetapan Indikator Kinerja Utama  
Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2017

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	Jumlah temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	Mengukur pencapaian target temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	Formulasi : (Jumlah temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi dibagi Target Jumlah Pemeriksaan Reguler) x 100%
2	Menurunnya temuan audit kinerja OPD di bawah target.	Jumlah OPD dengan kinerja di bawah target.	Mengukur pencapaian target temuan / audit OPD dengan kinerja di bawah target.	Formulasi : (Jumlah OPD dengan kinerja dibawah target dibagi Jumlah OPD Pemeriksaan Reguler) x 100%

**Tabel 2.6**  
Riview Indikator Kinerja Utama  
Inspektorat Kabupaten Berau yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RJMD  
TAHUN 2017-2021

**Tujuan ke 6 RPJMD** Mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, profesional & akuntabel

**Sasaran 17 RPJMD** Terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi

No.	INDIKATOR KINERJA SASARAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (TH.2016)	Target Kinerja Program PERTAHUN					kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	Temuan	15	13	13	10	10	10	10
2	Jumlah temuan Audit	opd	15	13	13	10	10	10	10



Kinerja OPD dibawah Tar- get;									
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Kriteria Skala Nilai Serapan Kinerja**

No.	Interval Nilai Serapan	Kriteria
1.	82 - 100	Sangat berhasil
2.	64 - 81	Tinggi/ Berhasil
3.	46 - 63	Cukup Berhasil
4.	28 - 45	Rendah
5.	0 - 27	Sangat Rendah

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis/ Penetapan Kinerja.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Kegiatan maka pencapaian Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Berau tahun 2019 **adalah 100 %** berdasarkan skala ordinal maka capaian tersebut dapat dikategorikan



“Sangat Berhasil” ( 82-100 ). Dibandingkan pada tahun 2018 pengukuran kinerja apabila dihitung pencapaian sasaran 1 adalah 3 temuan (77,66 %) dan pencapaian sasaran 2 adalah 2 opd ( 80,00% ) maka rata rata pencapaian Kinerja Tahun 2018 yaitu 78,83 % (kategori berhasil).

**Pencapaian Program Perioritas dalam Mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Utama pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :**

1. Indikator Kinerja Pemeriksaan Internal Secara Berkala :

Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Internal Secara Berkala Inspektorat Berau sebesar 79,42 % yaitu 220 kasus temuan dari 277 target kasus temuan yang berhasil diselesaikan.

2. Indikator Kinerja Pemeriksaan khusus/kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah:

Persentase Pemeriksaan khusus/kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah Inspektorat Berau dari target 49 Kasus pengaduan telah melaksanakan pemeriksaan sebanyak 29 kasus pengaduan sebesar 72,50 %.

3. Indikator Kinerja Pemeriksaan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya

Persentase Pemeriksaan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya dari target 100 kampung telah dilaksanakan pemeriksaan sebanyak 100 kampung sebesar 100%.

Detilnya Dapat digambarkan sebagaimana tabel 2.7 berikut :

**Tabel.2.7**

**Pengukuran Pencapaian Program Penunjang Indikator Kinerja Utama 2017-2021**

**Pengukuran Pencapaian Tahun 2019**

N o.	SASA-RAN STRATE-GIS	INDI-KATOR KINERJA	TAR-GET	REAL-ISASI	CA-PAI AN (%)	PROGRAM	KEGIATAN	CA-PA IAN	KETERANGAN		
									Internal Berkala	Rencana	Real-isasi
1	Menurunya temuan yang terindikasi tindak pidana korupsi	Jumlah temuan yang terindikasi tindak pidana korupsi	10 Temuan	0 Temuan	100	Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengawasan Internal secara berkala obrik yang diperiksa	79,42 %	Reviu Laporan Keuangan Pemda/OPD	1	1
									Reviu Laporan Lakip Pemda	1	1
									Evaluasi Lakip Semua OPD	47	47
									Sekolah penerima BOSDA Wilayah Kabupaten	80	80



							Berau			
							Review RKA Perubahan APBD 2018 (Semua OPD)	47	0	
							Review RKA Murni APBD 2019 (Semua OPD)	47	47	
							Reviu RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)	1	1	
							Pemeriksaan Khusus	40	29	
							Reviu Revisi RPJMD	0	1	
							Reviu LPPD	1	1	
							Penilaian Risiko pada 12 OPD	12	12	
							Jumlah	277	220	
						Pe-nanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah kasus yang diperiksa	72,50 %	<b>Khusus</b>	<b>Pen-gaduan</b>	<b>Real-isasi</b>
								Dilingkungan Pemerintah Daerah	40	29
						Pe-nanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya kasus yang diperiksa	100%	<b>Kasus Dibawahnya</b>	<b>Rencana</b>	<b>Real-isasi</b>
								Pemerintahan dibawahnya	100	100
						Jumlah tindak lanjut hasil temuan pengawasan internal berkala	11,56 %	<b>Jumlah Temuan yang sudah ditindak lanjuti</b>		<b>Jumlah Temuan</b>
								36		311
						Jumlah tindak lanjut temuan pengawasan khusus dilingkungan Pemerintah Daerah	100%	<b>Jumlah Temuan yang sudah ditindak lanjuti</b>		<b>Jumlah Temuan</b>
								29		29
						Jumlah tindak lanjut temuan pengawasan yang dilaporkan pengawasan khusus pada Pemerintah dibawahnya	14,17 %	<b>Jumlah Temuan yang sudah ditindak lanjuti</b>		<b>Jumlah Temuan</b>
								17		120



						Indikator	Rencana	Realisasi			
2	Menurunnya temuan audit kinerja OPD dibawah target	Jumlah OPD dengan kinerja dibawah target	10 OPD	0 OPD	80,00	Program Peningkatan Profesionalisme	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasaan	92,68 %	Jumlah Peserta Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & Aparatur pengawasaan	100	92,68%
						Program Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	91,97 %	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	91,97%
						Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	97,38 %	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal	100%	97,38%
						Program Peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	98,33 %	Persentase Kehadiran Pegawai Sesuai Jam Kerja	100%	98,33%
						Program Peningkatan pengembangan system pelaporan	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	112%	Nilai LKJIP	85,50	95,46
Pencapaian Sasaran Kinerja (IKU) Tahun 2019 dengan kategori / Predikat (berhasil)					100	Pencapaian Penunjang Sasaran Kinerja (IKU) Inspektorat	79,09 %	A			

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Berau

Inspektorat Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Pengawasan mempunyai fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati, menyusun laporan hasil pengawasan, melaksanakan administrasi Inspektorat dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan



pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dan Identifikasi isu-isu strategis :

### **1. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

- 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD, sebagai pertanggung jawaban capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja dan keuangan.
- 1.2. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, untuk Review, Lakip dan audit/ pemeriksaan pada Sekretariat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
- 1.3. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk audit/ pemeriksaan dari pengaduan/ memo pejabat Intansi Dinas, masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dan Telaahan Staf.
- 1.4. Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya, untuk audit/ pemeriksaan Kasus pada Kampung – kampung wilayah Kabupaten Berau.
- 1.5. Inventarisasi Temuan Pengawasan, merupakan akumulasi Rekomendasi/ Temuan dari hasil audit/ pemeriksaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya.
- 1.6. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan merupakan tingkat ketaatan Obrik untuk menindak – lanjuti rekomendasi/ temuan hasil audit/ pemeriksaan.
- 1.7. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, menambah Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas yang Mengikuti Diklat sebagai syarat wajib kompetensi.
- 1.8. Pelatihan Teknis Pengawasan, menambah Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas yang Mengikuti Diklat Teknik Pengawasan sebagai syarat tambahan kopetensi.



1.9. Melengkapi Peralatan /Perlengkapan Tekhnis Penunjang Pelaksanaan Pengawasan

## **2. Rekomendasi dan Catatan Strategis**

- 2.1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, dengan peningkatan jumlah kegiatan yang dapat di audit/ periksa pada Sekretariat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
- 2.2. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan peningkatan jumlah pengaduan/ memo pejabat Intansi Dinas, masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dan Telaahan Staft yang dapat di laksanakan audit/ pemeriksaan.
- 2.3. Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya, dengan peningkatan jumlah kegiatan audit/ pemeriksaan Kasus pada Kampung – kampung wilayah Kabupaten Berau yang dapat di laksanakan audit/ pemeriksaan.
- 2.4. Inventarisasi Temuan Pengawasan, dapat dilaksanakan monitoraing dan evaluasi Rekomendasi/ Temuan dari hasil audit/ pemeriksaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya, dengan sistematis dan tertib.
- 2.5. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, dapat meningkatkan ketaatan Obrik untuk menindak – lanjuti rekomendasi/ temuan hasil audit/ pemeriksaan dan pelaksanaan program kegiataanya, dimana jumlah temuan dari tahun ketahun diharapkan mengalami penurunan.



#### **2.4. Review Rancangan Awal RKPD terhadap Renja Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2019.**

Dibandingkan dengan rancangan RKPD 2019, maka Renja Tahun 2020 ada perbedaan mendasar dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perbandingan antara Rancangan RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Berau. Dengan demikian amat penting untuk menyusun Renja SKPD dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Berau berikut Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2021 :



**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Berau, wil. Prop. Kaltim dan wil. luar Prop. Kaltim	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100 %	1,992,364,200.00	100 %	2,359,460,200.00	367,096,000.00
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Berau	Jumlah surat menyurat yang bermaterai /berperangko	583 lembar	5,304,000.00	583 lbr	5,580,000.00	276,000.00
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Berau	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	238,076,800.00	12 bln	238,076,800.00	-
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Kab. Berau	Jumlah Kendaraan Dinas yang diservice, ganti suku cadang, KIR dan mendapat BBM	31 unit	481,000,000.00	31 unit	481,000,000.00	-
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Berau	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan tim	20 orang	186,274,400.00	20 org	186,274,400.00	-
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab. Berau	Luas gedung dan halaman yang dibersihkan	1438 m2	6,929,000.00	1.438 M <sup>2</sup>	6,929,000.00	-
09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kab. Berau	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	5 unit	32,500,000.00	5 unit	32,500,000.00	-
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Berau	Jenis ATK yang disediakan	20 jenis	65,000,000.00	20 jenis	85,000,000.00	20,000,000.00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Berau	Jumlah Dokumen yang dicetak	70 buah	22,750,000.00	70 buah	22,750,000.00	-
12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kab. Berau	Jenis Peralatan Listrik yang disediakan	5 jenis	5,200,000.00	5 jenis	5,200,000.00	-
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Berau	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor	4 unit	162,500,000.00	7 jenis	325,000,000.00	162,500,000.00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Berau	Jumlah Peralatan rumah tangga	9 buah	4,550,000.00	9 buah	4,550,000.00	-
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Kab. Berau	Jumlah Bacaan yang disediakan	600 eksplr	5,200,000.00	600 ekspl	5,200,000.00	-
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Berau	Jumlah Makanan minum rapat dan tamu	37 kali	49,400,000.00	50 kali	70,000,000.00	20,600,000.00
18	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Wil. luar Prop. Kaltim	Jumlah Kordinasi Dan konsultasi keluar daerah	40 OT	371,280,000.00	40 OT	480,000,000.00	108,720,000.00
19	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Wil. Prop. Kaltim	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	47 ok	65,000,000.00	47 ok	120,000,000.00	55,000,000.00



	20	Penyediaan jasa Tenaga administrasi / teknis perkantoran	Kab. Berau	Jumlah tenaga administrasi / teknis perkantoran	9 orang	291,400,000.00	9 org	291,400,000.00	-
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>Kab. Berau</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal</b>	<b>80%</b>	<b>127,500,000.00</b>	<b>80%</b>	<b>298,500,000.00</b>	<b>171,000,000.00</b>
	10	Pengadaan Mebelair	Kab. Berau	Jumlah Mebelair	-	-	-	-	-
	21	Pengadaan Gedung kantor	Kab. Berau	Jumlah Mobil jabatan	-	-	-	-	-
	-	Pengadaan Mobil jabatan	Kab. Berau	Jumlah Kendaraan dinas / operasional roda 2	-	-	-	-	-
	-	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional roda 2	Kab. Berau	Jumlah Teknologi Informasi pengawasan	-	-	-	-	-
	-	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Kab. Berau	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	-	-	-	-	-
	-	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Kab. Berau	Jumlah perlengkapan gedung kantor diperbaiki	-	-	-	-	-
	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kab. Berau	Jumlah Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	1 kali	19,500,000.00	1 kali	19,500,000.00	-
	-	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Kab. Berau	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala mobil	-	-	-	-	-
	-	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional roda 2	Kab. Berau	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional roda 2 yang dibayarkan	-	-	-	-	-
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Berau	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5 jenis	4,000,000.00	5 jenis	4,000,000.00	-
	-	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab. Berau	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang dibayarkan	-	-	-	-	-
	31	Penyediaan Sewa gedung kantor	Kab. Berau	Jumlah Sewa gedung kantor yang dibayarkan	-	-	-	-	-
	42	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Kab. Berau	Jumlah Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor yang dibayarkan	-	-	-	-	-
	43	Rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan	Kab. Berau	Jumlah Rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan yang dibayarkan	-	-	-	-	-
	44	Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas operasional	Kab. Berau	Jumlah Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas operasional yang dibayarkan	-	-	-	-	-



	45	Pengadaan teknologi informasi pengawasan	Kab. Berau	Jumlah Teknologi Informasi pengawasan	1 set	104,000,000.00	1 set	275,000,000.00	171,000,000.00
<b>03</b>	<b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>Kab. Berau</b>	<b>Persentase rata rata tingkat kehadiran dan kedisiplinan berpakaian dinas</b>	<b>100 %</b>	<b>46,800,000.00</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	<b>(46,800,000.00)</b>
	02	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Berau	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya	60 stell	46,800,000.00	60 stell	46,800,000.00	-
<b>05</b>	<b>Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>Kab. Berau, wil. Prop. Kaltim dan wil. luar Prop. Kaltim</b>	<b>Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi / kualifikasi pada unit kerjanya</b>	<b>100 %</b>	<b>130,000,000.00</b>	<b>100 %</b>	<b>130,000,000.00</b>	<b>-</b>
	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Berau, wil. Prop. Kaltim dan wil. luar Prop. Kaltim	Jumlah peserta Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	-	-	-
	02	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Berau	Jumlah yang mengikuti pelatihan BIMTEK	10 orang	130,000,000.00	10 orang	130,000,000.00	-
<b>06</b>	<b>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>Kab. Berau</b>	<b>Nilai LKjIP</b>	<b>86 %</b>	<b>32,500,000.00</b>	<b>86 %</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>17,500,000.00</b>
	09	Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	Kab. Berau	Jumlah Dokumen perencanaan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi	5 dok	32,500,000.00	5 dok	50,000,000.00	17,500,000.00
	05	Sosialisasi kinerja program SKPD	Kab. Berau	Jumlah Sosialisasi kinerja program SKPD melalui pameran yang	-	-	-	-	-
<b>20</b>	<b>Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>		<b>Kab. Berau, wil. Prop. Kaltim dan wil. luar Prop. Kaltim</b>	<b>Persentase Pemeriksaan dengan temuan yang ditindak lanjuti</b>	<b>86 %</b>	<b>5,890,430,000.00</b>	<b>86 %</b>	<b>5,794,500,000.00</b>	<b>(95,930,000.00)</b>
	01	Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala	Kab. Berau	Jumlah Pengawasan internal secara berkala (Obrik yang diperiksa)	60 obrik	2,645,500,000.00	60 obrik	2,645,500,000.00	-
	02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Kab. Berau	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	40 kasus	871,000,000.00	40 kasus	871,000,000.00	-
	04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Kab. Berau	Jumlah kampung ditangani penanganan kasus	100 kpg	1,040,000,000.00	100 kpg	1,040,000,000.00	-
	05	Inventarisasi temuan pengawasan	Kab. Berau	Jumlah Laporan Inventarisasi temuan pengawasan	4 laporan	260,000,000.00	4 laporan	260,000,000.00	-
	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Kab. Berau	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	12 kali	345,930,000.00	12 kali	250,000,000.00	(95,930,000.00)
	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Kab. Berau	Jumlah Koordinasi pengawasan dan saber pungli	24 kali	650,000,000.00	24 kali	650,000,000.00	-
	08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Kab. Berau	Jumlah temuan yang dievaluasi	2 kali	78,000,000.00	2 kali	78,000,000.00	-



09	Pembinaan, Identifikasi dan penilaian risiko perangkat daerah	Kab. Berau	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan, Identifikasi dan Penilaian risiko	12 OPD	91,000,000.00	12 OPD	91,000,000.00	-	
10	Pemberian / Pelayanan jasa advice pengawasan	Kab. Berau	Jumlah jenis jasa advice pengawasan yang dilaksanakan	2 kegiatan	65,000,000.00	2 kegiatan	65,000,000.00	-	
11	Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	Kab. Berau	Jumlah kegiatan Pendampingan yang dilaksanakan	2 kegiatan	200,000,000.00	2 kegiatan	200,000,000.00	-	
12	Korsupgah KPK ( MCP dan Jaga)	Kab. Berau	Jumlah kegiatan Pendampingan yang dilaksanakan	2 kegiatan	150,000,000.00	2 kegiatan	150,000,000.00	-	
13	Pembinaan dan Pengendalian Gratifikasi	Kab. Berau	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengendalian	1 kegiatan	150,000,000.00	1 kegiatan	150,000,000.00	-	
14	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	Kab. Berau	Jumlah Pendampingan yang	1 kegiatan	300,000,000.00	1 kegiatan	300,000,000.00	-	
<b>21</b>	<b>Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	<b>Kab. Berau, wil. Prop. Kaltim dan wil. luar Prop. Kaltim</b>	<b>Persentase auditor yang bersertifikat</b>	<b>100 %</b>	<b>1,024,147,800.00</b>	<b>100 %</b>	<b>2,586,700,000.00</b>	<b>1,562,552,200.00</b>	
01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Luar Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti	30 orang	325,000,000.00	60 orang	1,080,000,000.00	755,000,000.00	
02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas	Luar Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan teknis pengawasan yang mengikuti	35 orang	195,000,000.00	35 orang	630,000,000.00	435,000,000.00	
03	Pengembangan wawasan aparat pengawas internal pemerintah daerah	Luar Daerah	Jumlah peserta pengembangan wawasan aparat pengawas internal pemerintah daerah	30 orang	167,447,800.00	35 orang	540,000,000.00	372,552,200.00	
04	Pengembangan wawasan aparat pengawas internal pemerintah daerah	Kab. Berau	Jumlah Peserta Pengembangan wawasan aparat pengawas internal pemerintah daerah yang mengikuti	2 kegiatan	336,700,000.00	2 kegiatan	336,700,000.00	-	
<b>Jumlah Alokasi 2021</b>							<b>9,243,742,000.00</b>	<b>11,219,160,200.00</b>	<b>1,975,418,200.00</b>

Tanjung Redeb, 20 Pebruari 2020

Inspektorat Kabupaten Berau

Inspektur,

**Ir.H.Riza Fakhmi**

Pembina TK.I

NIP. 19671001 199803 1 007



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, meliputi :
  - a. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan, dan barang/asset terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - b. Review Rencana Kerja Anggaran;
  - c. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - d. Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
  - f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
  - h. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
  - i. Pendampingan, asistensi, fasilitasi;
  - i. Pengawasan atas Tugas Pembantuan; dan



- k. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik, meliputi :
  - a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
    - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
    - 2) Evaluasi periodic pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
    - 3) Pembangunan zona integritas;
    - 4) Pengendalian gratifikasi;
    - 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
    - 6) Penanganan pengaduan masyarakat;
    - 7) Penguatan Whistle Blowing System;
    - 8) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
    - 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
  - b. Pemantauan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
  - c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
  - a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  - b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  - c. Koordinasi program pengawasan;
  - d. Tugas lain sesuai kebijakan kepala daerah.

### **Telahaan, Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Berau baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.



Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, Inspektorat sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Berau merujuk setiap gerak langkah dalam Rencana Strategisnya kepada visi Kabupaten Berau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau tahun 2016-2021. Visi Kabupaten Berau untuk tahun 2016 – 2021 adalah : “MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN”

Untuk mewujudkan visinya, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut :

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal;
3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi;
4. Menciptakan Tata Pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja**

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan



sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja. Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Berau untuk periode 2016–2021 adalah sebagai berikut :

3.2.1. Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik pada jajaran pemerintah Kabupaten Berau merupakan tujuan, dari misi inspektorat menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung, serta Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pengambilan kebijakan, dengan sasaran Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

3.2.2. Menurunnya temuan audit kinerja OPD di bawah target.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik pada jajaran pemerintah Kabupaten Berau merupakan tujuan, dari misi inspektorat dalam Mendorong terwujudnya aparatur yang bersih dan handal serta Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan. sebagai upaya dengan sasaran Menurunnya temuan audit kinerja OPD dibawah target. Sistematika dalam Tabel 4.1 sebagai berikut ;

**Tabel 4.1**  
**Target Sasaran Untuk Lima Tahun Kedepan Inspektorat Kabupaten Berau**

**VISI : MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN**

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran (satuan)	Kon disi awal	TARGET TAHUNAN					Target Akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	
MISI 4 RPJMD	Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel							
Tujuan 6 RPJMD	Mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel							
Sasaran 17 RPJMD	Terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi							



1	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;									
	1	Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	Jumlah temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	15	15	13	13	10	10	10
2	Mewujudkan akuntabilitas kinerja.									
	2	Menurunnya temuan audit kinerja OPD di bawah target.	Jumlah OPD dengan kinerja di bawah target.	15	15	13	13	10	10	10

### 3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kab.Berau berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran sebagai berikut:

#### Sasaran 1 : Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;

PROGRAM	KEGIATAN				KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KD	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Pengawasan internal secara berkala (Obrik yang diperiksa)	Obrik	60	
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	Kasus	40	
	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Jumlah kampung ditangani penanganan kasus	Kampung	100	



Inventarisasi temuan pengawasan	Jumlah Laporan Inventarisasi temuan pengawasan	Laporan	4	
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	kali	4	
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah Koordinasi pengawasan dan saber pungli	Kali	24	
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah temuan yang dievaluasi	kali	12	
Pembinaan, Identifikasi dan penilaian risiko perangkat daerah	Jumlah laporan identifikasi dan penilaian risiko	OPD	12	
Pemberian / Pelayanan Jasa Advice Pengawasan	Jumlah pelayanan yang dilakukan	Kegiatan	2	

**Sasaran 2 : Menurunnya temuan audit kinerja OPD di bawah target.**

PROGRAM	KEGIATAN				KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Kebijakan KD	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah peserta Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan	Orang	20	
	Pelatihan teknis pengawasan	Jumlah peserta Pelatihan teknis pengawasan	Orang	5	
	Pengembangan wawasan aparat pengawas internal pemerintah daerah	Jumlah peserta Pengembangan wawasan aparat pengawas internal pemerintah daerah	orang	25	
	Sosialisasi peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	30	
Program Pe-		Persentase unit ker-	%	100	



layanan administrasi perkantoran		ja Internal yang terlayani dengan baik			
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal	%	80	
Program Peningkatan disiplin aparatur		Persentase rata rata tingkat kehadiran dan kedisiplinan berpakaian dinas	%	100	
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi / kualifikasi pada unit kerjanya	%	100	
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Nilai LKJiP	angka	86	

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prekiraan Maju Tahun 2020 sebagai berikut :





## RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2020)		Prakiraan Maju (2021)	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Pe-nanggung jawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output		Kegiatan	Program		1/2/3	1/2/3
					Uraian	Target	Uraian	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	<b>URUSAN WAJIB OTONOMI DAE-RAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMIN-ISTRASI KEU-ANGAN DAE-RAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSAN-DIAN</b>		Mencip-takan tata pemerintahan yang bersih, berwiba-wa, transparan dan akuntabel		Tercip-tanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi								
	<b>Inspektorat</b>									<b>8,348,740,000</b>	<b>10,853,362,000</b>		
4	0	0	0	0	Program Pelayan-an admin-istrasi per-kantoran								
2	1	1	1			Persen-tase unit kerja in-ternal yang ter-layani dengan baik	100%			1,599,834,000	2,079,784,200	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0	0	Penyediaan jasa surat menyurat			Kab Berau					
2	1	1	1					Jumlah surat me-nyurat yang bermaterai /berperangk	583 lembar	4,080,000	5,304,000	sedang berjalan	Inspektorat



4	0	0	0	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kab Berau		Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	183,136,000		238,076,800	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0	0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional			Kab Berau		Jumlah Kendaraan Dinas yang diservice, ganti suku cadang, KIR dan mendapat BBM	31 unit	370,000,000		481,000,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0	0	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kab Berau		Jumlah tenaga administrasi keuangan dan tim penilai angka kredit fungsional	23 orang	143,288,000		186,274,400	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0	0	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kab Berau		Luas gedung dan halaman yang dibersihkan	1438 m2	5,330,000		6,929,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0	0	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kab Berau		Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	5 unit	25,000,000		32,500,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0	1	Penyediaan alat tulis kantor			Kab Berau		Jenis ATK yang disediakan	20 jenis	50,000,000		65,000,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0	1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kab Berau		Jumlah Dokumen yang dicetak	70 buah	17,500,000		22,750,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0	1	Penyediaan komponen instalasi listrik / pererangan bangunan kantor			Kab Berau		Jenis Peralatan Listrik yang disediakan	5 jenis	4,000,000		5,200,000	sedang berjalan	Inspektorat



**Inspektorat Kabupaten Berau (RENJA 2020)**

4	0	0	0	1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Kab Berau		Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor	7 jenis	125,000,000		162,500,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0	1	Penyediaan peralatan rumah tangga			Kab Berau		Jumlah Peralatan rumah tangga	9 buah	3,500,000		4,550,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0	1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan			Kab Berau		Jumlah Bacaan yang disediakan	800 eks	4,000,000		5,200,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0	1	Penyediaan makanan dan minuman			Kab Berau		Jumlah Makan minum rapat dan tamu	37 kali	38,000,000		49,400,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0	1	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Luar Daerah		Jumlah Kordinasi Dan konsultasi keluar daerah	28 OT	285,600,000		371,280,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0	1	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			Kab Berau		Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	47 OK	50,000,000		65,000,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0	2	Penyediaan jasa Tenaga administrasi / teknis perkantoran			Kab Berau		Jumlah Tenaga administrasi / teknis perkantoran	9 orang	291,400,000		378,820,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0		<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal</b>	<b>80%</b>			<b>99,000,000</b>	<b>128,700,000</b>	<b>sedang berjalan</b>	<b>Inspektorat</b>



4	0	0	0	1	Pengadaan Mebelair			Kab Berau			Jumlah Mebelair					Inspektorat
					Pengadaan Mobil jabatan			Kab Berau			Jumlah Mobil jabatan	1 Unit	-	-		Inspektorat
					Pengadaan Kendaraan dinas / operasional roda 2			Kab Berau			Jumlah Kendaraan dinas / operasional roda 2	6 Unit				Inspektorat
4	0	0	0	2	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor			Kab Berau			Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 kali	15,000,000	19,500,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0	2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Kab Berau			Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5 Jenis	4,000,000	5,200,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0	4	Pengadaan Teknologi Informasi pengawasan			Kab Berau			Jumlah Teknologi Informasi pengawasan	1 Set	80,000,000	104,000,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0		<b>Program Peningkatan disiplin aparat</b>					<b>Persentase rata-rata tingkat kehadiran dan kedisiplinan berpakaian dinas</b>			<b>36,000,000</b>	<b>46,800,000</b>	<b>sedang berjalan</b>	<b>Inspektorat</b>
4	0	0	0	0	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kab Berau			Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibayarkan	60 Stell	36,000,000	46,800,000	sedang berjalan	Inspektorat



4	0	0	0	0	0	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerjanya	100%				100,000,000	130,000,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0	0	0	Pendidikan dan pelatihan formal			Luar Daerah			Jumlah Peserta Pendidikan dan pelatihan formal yang mengikuti	20 Orang	-		-	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0	0	0	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan			dalam dan luar daerah			Jumlah yang mengikuti pelatihan BMTEK diluar daerah dan Perangkat daerah yg mengikuti sosialisasi di Kab	10 Orang	100,000,000		130,000,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0	0	0	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Nilai LKjIP	86				25,000,000.00	32,500,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	0	0	0	Sosialisasi kinerja program SKPD			Kab Berau'			Jumlah Dokumen perencanaan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 kali	-	-	-	sedang berjalan	Inspektorat



4	0	0	0	0	Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD			Kab Berau		Jumlah Sosialisasi kinerja program SKPD melalui pameran yang diikuti	5 dokumen	25,000,000	-	32,500,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	2		<b>Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>				<b>Persentase Pemeriksaan dengan temuan yang ditindak lanjuti</b>	<b>86.5%</b>			<b>5,451,100,000</b>	<b>7,086,430,000</b>	<b>sedang berjalan</b>	<b>Inspektorat</b>
4	0	0	2	0	Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala			Kab Berau'		Jumlah Pengawasan internal secara berkala (Obrik yang diperiksa)	60 obrik	2,035,000,000	0	2,645,500,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	2	0	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah			Kab Berau		Jumlah Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	40 kasus	670,000,000		871,000,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	2	0	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya			Kab Berau		Jumlah Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	100 kampung	800,000,000		1,040,000,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	2	0	Inventarisasi temuan pengawasan			Kab Berau		Jumlah laporan Inventarisasi temuan pengawasan	4 laporan	200,000,000		260,000,000	sedang berjalan	Inspektorat



**Inspektorat Kabupaten Berau (RENJA 2020)**

4	0	0	2	0	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan			Kab Berau		Jumlah koordinasi Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	12 kali	266,100,000	345,930,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	2	0	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif			Kab Berau		Terkoordinasinya Pengawasan yang lebih komprehensif dan terlaksananya saberpungli	24 kali	500,000,000	650,000,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	2	0	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan			Kab Berau		Jumlah evaluasi temuan pengawasan	2 dokumen	60,000,000	78,000,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	2	0	Pembinaan, Identifikasi dan penilaian Resiko Perangkat Daerah			Kab Berau		Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pembinaan, Identifikasi dan penilaian Resiko	12 opd	70,000,000	91,000,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	2	1	Pemberian/Pelayanan Jasa Advice Pengawasan			Kab Berau		Jumlah jenis jasa advice pengawasan yang dilaksanakan (3 jns keg)	2 jenis keg	50,000,000	65,000,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	2	1	Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi			Kab Berau		Jumlah kegiatan pendampingan yang dilaksanakan	2 jenis keg	200,000,000	260,000,000	Baru	Inspektorat



**Inspektorat Kabupaten Berau (RENJA 2020)**

4	0	0	2	1	Korsupgah KPK (MCP dan Jaga)			Kab Berau			Jumlah kegiatan pendampingan yang dilaksanakan	2 jenis keg	150,000,000		195,000,000	Baru	Inspektorat
4	0	0	2	1	Pembinaan dan Pengendalian Gratifikasi			Kab Berau			Jumlah kegiatan pendampingan yang dilaksanakan	1 jenis keg	150,000,000		195,000,000	Baru	Inspektorat
4	0	0	2	1	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK			Kab Berau			Pendampingan yang dilakukan BPS	1 jenis keg	300,000,000		390,000,000	Baru	Inspektorat
4	0	0	2	1	<b>Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>				<b>Persentase auditor yang bersertifikat</b>	<b>100%</b>			<b>1,037,806,000</b>	<b>1,349,147,800</b>	<b>sedang berjalan</b>	<b>Inspektorat</b>	
4	0	0	2	0	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			Luar Daerah			Jumlah peserta Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasaan	21 orang	250,000,000		325,000,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	2	0	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja			Luar Daerah			Jumlah peserta Pelatihan teknis pengawasaan	30 Orang	150,000,000		195,000,000	sedang berjalan	Inspektorat



**Inspektorat Kabupaten Berau (RENJA 2020)**

4	0	0	2	0	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			Luar Daerah		Jumlah peserta Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	30 orang	250,000,000	325,000,000	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	2	0	Pengembangan wawasan aparat pengawas internal pemerintah daerah			Luar Daerah		Jumlah peserta Pengembangan wawasan aparat pengawas internal pemerintah daerah	25 orang	128,806,000	167,447,800	sedang berjalan	Inspektorat
4	0	0	2	0	Sosialisasi, peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP			Kab Berau		Penilaian level peningkatan maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	2 jns keg	259,000,000	336,700,000	sedang berjalan	Inspektorat

Tanjung Redeb, 20 Februari 2020  
Inspektorat Kabupaten Berau



**Inspektur,**  
**Ir.H.Riza Fakhmi**  
Pembina TK.I  
**NIP. 19671001 199803 1 007**



## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Berau selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja karena melalui Renja ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kinerja ini diharapkan setiap unsur aparatur dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (outcome) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Berau dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Berau serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Berau.

Tanjung Redeb, 20 Februari 2020



Inspektur,

**Ir.H.Riza Fakhmi**

Pembina TK.I

**NIP. 19671001 199803 1 007**



## **LAMPIRAN –LAMPIRAN**



# USULAN RENJA SKPD INSPEKTORAT 2020

## SEBAGAI BAHAN RANCANGAN AWAL MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BERAU TAHUN 2021

Kode Rek prog keg	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAE- RAH Organisasi	Lokasi	Sasaran Kegiatan TA 2019	Volume	Usulan 2019 Per-Sub Kegiatan (Rp.)	Organisasi	USULAN RENJA SKPD 2019 (RP.)					KET		
							APBD Kab/Kota	Total Usulan Per-SKPD (APBD Kab.)	APBD Prop.		APBN/ DAK / HPLN		Lain- lain	
									APBD Prop. Mumi	Bantuan Keu Prop				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	URUSAN WAJIB													
20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN													
1.20.07	INSPEKTORAT KABUPATEN BERAU													
1.20.07	Inspektorat							8.503.297.800						
07.20.01	Program Pelayanan administrasi per- kantoran	Kabupaten Berau	Persentase unit kerja Internal yang terlaya- nai dengan baik	100%			1.571.845.800							
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Berau	Jumlah surat me- nyurat yang ber- materai /berperangko	583 lembar	4.080.000	inspektorat	4.080.000							



01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Berau	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	198.600.000	inspektorat	198.600.000							
01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Kabupaten Berau	Jumlah Kendaraan Dinas yang diservice, ganti suku cadang, KIR dan mendapat BBM	31 unit	420.000.000	inspektorat	420.000.000							
01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Berau	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan tim penilai angka kredit fungsional	23orang	123.388.000	inspektorat	123.388.000							
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Berau	Luas gedung dan halaman yang dibersihkan	1438 m2	5.330.000	inspektorat	5.330.000							
01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kabupaten Berau	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	5 unit	25.000.000	inspektorat	25.000.000							
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Berau	Jenis ATK yang disediakan	20 jenis	60.000.000	inspektorat	60.000.000							
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Berau	Jumlah Dokumen yang dicetak	70 buah	16.000.000	inspektorat	16.000.000							
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kabupaten Berau	Jenis Peralatan Listrik yang disediakan	5 jenis	3.000.000	inspektorat	3.000.000							
01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Berau	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor	7 jenis		inspektorat	189.647.800							
			<b>Pengadaan Alat Penunjang pengawasan :</b>											
			Meteran gulung / rol fiber glas 50 m	8 buah	1.200.000									



			Meteran gulung / rol stell / Baja 7,5 m	8 buah	544.800								
			Distrometer	4 buah	49.968.000								
			Mesin Penghancur Kertas	5 buah	32.575.000								
			Laptop	5 unit	75.000.000								
			Printer	5 unit	17.260.000								
			Sanner portable	4 buah	12.000.000								
			adm penunjang	1 paket	1.100.000								
<b>01.14</b>	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten Berau	Jumlah Peralatan rumah tangga	9 buah	3.000.000	inspektorat	3.000.000						
<b>01.15</b>	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kabupaten Berau	Jumlah Bacaan yang disediakan	800 eks	14.400.000	inspektorat	14.400.000						
<b>01.17</b>	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Berau	Jumlah Makanan minum rapat dan tamu	37 kali	38.000.000	inspektorat	38.000.000						
<b>01.18</b>	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	keluar daerah	Jumlah Kordinasi Dan konsultasi keluar daerah	20 ot	250.000.000	inspektorat	150.000.000						
<b>01.19</b>	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten Berau	Jumlah koordina-si dan kon-sultasi ke dalam daerah	47 ok	50.000.000	inspektorat	30.000.000						
<b>01.20</b>	Penyediaan jasa Tenaga administrasi / teknis perkantoran	Kabupaten Berau	Jumlah tenaga administrasi / teknis perkantoran	9 orang	291.400.000	inspektorat	291.400.000						



<b>20.02</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Kabupaten Berau</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal</b>	<b>80%</b>		<b>inspektorat</b>							
02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kabupaten Berau	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 kali	15.000.000	inspektorat	15.000.000						
02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Berau	Jumlah perlengkapan gedung kantor diperbaiki	5 jenis	4.000.000	inspektorat	4.000.000						
02.45	Pengadaan teknologi informasi pengawasan	Kabupaten Berau	Jumlah Teknologi Informasi pengawasan	1 set	-	inspektorat	-						
<b>20.05</b>	<b>Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Kabupaten Berau</b>	<b>Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi / kualifikasi pada unit kerjanya</b>	<b>87%</b>		<b>inspektorat</b>							
<b>05.01</b>	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	<b>Kabupaten Berau</b>	<b>Jumlah peserta Pendidikan dan pelatihan formal</b>	<b>20 orang</b>		<b>inspektorat</b>	<b>300.000.000</b>						
			Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan teknis dll	20 orang	200.000.000								



			Kontribusi peserta	20 orang	100.000.000							
<b>05.02</b>	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Kabupaten Berau	Jumlah yang mengikuti pelatihan BMTEK diluar daerah dan Perangkat daerah yg mengikuti sosialisasi di Kab	53 orang		inspektorat	100.000.000					
			Mangikuti Bimtek Peraturan Perundang undangan	3 orang	17.500.000							
			Kontribusi peserta	3 orang	7.500.000							
			Sosialisasi / Pembinaan pelaksanaan Peraturan /Keputusan Tentang Pengawasan di Kab	47 opd	75.000.000							
<b>20.06</b>	<b>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Kabupaten Berau</b>	<b>Nilai LKJiP</b>	<b>86,5</b>		<b>inspektorat</b>						
<b>06.09</b>	Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	Kabupaten Berau	Jumlah Dokumen perencanaan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dokumen	10.000.000	inspektorat	10.000.000					



<b>06.05</b>	Sosialisasi kinerja program SKPD	Kabupaten Berau	Jumlah Sosialisasi kinerja program SKPD melalui pameran yang diikuti	1 kali	25.000.000	inspektorat	25.000.000						
<b>20</b>	<b>Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>Kabupaten Berau</b>	<b>Persentase Pemeriksaan dengan temuan yang ditindaklanjuti</b>	<b>86,50%</b>		<b>inspektorat</b>							
<b>20.01</b>	Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala	Kabupaten Berau	Jumlah Pengawasan internal secara berkala (Obrik yang diperiksa)	60 obrik		inspektorat	2.335.000.000						
			pelaksanaan audit Pengawasan / Pemeriksaan di Kab Berau	60 obrik	2.260.000.000								
			Perjalana dinas luar daerah pelaksanaan audit Pengawasan / Pemeriksaan di luar daerah / konsultasi / mengikuti wokshop / seminar ttg pengawasan / pemeriksaan	10 ot	75.000.000								
<b>20.02</b>	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Kabupaten Berau	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	40 kasus	800.000.000	inspektorat	800.000.000						



20,04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Kabupaten Berau	Jumlah kampung ditangani penanganan kasus	100 kampung	800.000.000	inspektorat	800.000.000						
20,05	Inventarisasi temuan pengawasan	Kabupaten Berau	Jumlah Laporan Inventarisasi temuan pengawasan	4 laporan	267.380.000	inspektorat	267.380.000						
20,06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Kabupaten Berau	Jumlah koordinasi tindak lanjut hasil temuan pengawasan	12 kali	266.100.000	inspektorat	266.100.000						
20,07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Kabupaten Berau	Jumlah Koordinasi pengawasan dan saber pungli	24 kali	579.672.000	inspektorat	579.672.000						
20,08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Kabupaten Berau	Jumlah evaluasi temuan pengawasan	2 kali	35.000.000	inspektorat	35.000.000						
20,09	Pembinaan,Identifikasi dan penilaian Resiko Perangkat Daerah	Kabupaten Berau	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pembinaan, Identifikasi dan penilaian Resiko	12 opd	100.000.000	inspektorat	100.000.000						
20,10	Pemberian/Pelayanan Jasa Advice Pengawasan	Kabupaten Berau	Jumlah jenis jasa advice pengawasan yang dilaksanakan	2 jns keg	100.000.000	inspektorat	100.000.000						
21	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Kabupaten Berau	Persentase Auditor yang bersertifikat	87%									



			Level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP	3									
<b>21.01</b>	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Kabupaten Berau	Jumlah peserta Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan, Diklat Pembentukan P2UPD	21 orang	350.000.000	inspektorat	350.000.000						
<b>21.03</b>	Pelatihan teknis pengawasan	Kabupaten Berau	Jumlah peserta Pelatihan teknis pengawasan	5 orang	52.500.000	inspektorat	52.500.000						
			Pelatihan Tekhnis pengawasan	5 orang	37.500.000								
			Kontribusi pelatihan tekhnis pengawasan	5 orang	15.000.000								
<b>21.04</b>	Pengembangan wawasan aparat pengawas internal pemerintah daerah	Kabupaten Berau	Jumlah peserta Pengembangan wawasan aparat pengawas internal pemerintah daerah	25 orang	312.500.000	inspektorat	312.500.000						
<b>21.05</b>	Sosialisasi peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP	Kabupaten Berau	Penilaian level peningkatan maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	2 jns keg		inspektorat	511.800.000						
						<b>JUMLAH</b>	<b>8.503.297.800</b>						



Tanjung Redeb, 14 Maret 2018

**INSPEKTORAT KABUPATEN BERAU**

Inspektur,  
  


**Ir.H.Riza Fakhmi**  
Pembina TK.I  
**NIP. 19671001 199803 1 007**